



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perjalanan dinas dalam negeri bagi bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diharapkan dapat menjaga ketertiban administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- c. bahwa dengan adanya pencabutan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka muatan materi dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. biaya parkir, biaya masuk jalan tol, retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. biaya tiket;
 - b. biaya ...

- b. biaya taksi;
 - c. biaya transportasi darat; dan/atau
 - d. biaya bahan bakar minyak kendaraan dan biaya tol.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil bagi Pelaksana SPD.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dibayarkan untuk Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dengan menggunakan moda transportasi umum, antara lain:
 - a. pesawat terbang;
 - b. kereta api;
 - c. bus;
 - d. kapal; atau
 - e. moda transportasi umum lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam penggunaan moda transportasi pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tiket pesawat terbang untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD paling tinggi yaitu kelas bisnis; dan
 - b. tiket pesawat terbang untuk Anggota DPRD, ASN, Calon PNS, atau pihak lain yang mendampingi Perjalanan Dinas luar kota yaitu kelas ekonomi.
- (3) Bagi ASN yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan ke luar Daerah di wilayah Pulau Jawa dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang dalam rangka, mengirim surat, dokumen, konsultasi, dan/atau koordinasi diperbolehkan dengan ketentuan tidak menginap kecuali terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal:
 - a. bencana alam;
 - b. perang atau kerusuhan;
 - c. penyakit menular; dan/atau
 - d. kebijakan pemerintah yang melarang atau membatasi perjalanan tertentu.
- (5) Satuan biaya tiket pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dengan ketentuan:

a. penggunaan ...

- a. penggunaan moda transportasi umum taksi hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas luar kota sebagai transportasi lokal;
 - b. keberangkatan diperhitungkan dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan dan dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan;
 - c. kepulangan diperhitungkan dari Tempat Tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; dan
 - d. pembiayaan taksi Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (7) Satuan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) atau sekali jalan yang merupakan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, Calon PNS dan pihak lain dari Tempat Kedudukan di ibu kota provinsi ke Tempat Tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam negeri.
- (9) Biaya bahan bakar minyak kendaraan dan biaya tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d berlaku ketentuan:
- a. dalam melakukan kegiatan Perjalanan Dinas dengan menggunakan mobil dinas/kendaraan roda 4 (empat) milik ASN tidak diberikan biaya transportasi, namun diberikan biaya yang timbul dari Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas tersebut (biaya bahan bakar minyak dan biaya tol);
 - b. penghitungan penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional berlaku ketentuan bagi kendaraan roda 4 (empat) setiap 1 (satu) liter bahan bakar minyak diperhitungkan untuk menempuh jarak 5 (lima) kilometer dan bagi kendaraan roda 2 (dua) setiap 1 (satu) liter bahan bakar minyak diperhitungkan untuk menempuh jarak 25 (dua puluh lima) kilometer;

c. apabila ...

- c. apabila dalam pengadaan bahan bakar minyak di lokasi Tempat Kedudukan Pelaksana SPD tidak terdapat stasiun pengisian bahan bakar umum, dapat melakukan kerja sama dan/atau pengisian dengan penyedia bahan bakar minyak/pertamini; dan
 - d. biaya tol diperhitungkan dari *print out* e tol selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (10) Moda transportasi bagi ASN, Calon PNS atau pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, pejabat eselon II dan pejabat eselon III ke daerah lain dapat menggunakan transportasi yang sama dengan Pejabat yang didampingi dengan memperhatikan kelas tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (11) Apabila dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Perangkat Daerah tidak dapat menyediakan atau memfasilitasi alat transportasi, penggunaan kendaraan umum dinilai tidak efektif, maka dapat menggunakan kendaraan milik ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (12) Penggunaan kendaraan roda 4 (empat) milik ASN paling sedikit 2 (dua) orang.
- (13) Risiko kerusakan/kehilangan penggunaan kendaraan milik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riil bagi Pelaksana SPD.
- (3) Pembayaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*) dengan batasan tertinggi sesuai tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan maka diberikan pengganti biaya penginapan secara *Lumpsum*.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan pengganti biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. pengganti biaya pengganti penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (7) ASN dan/atau pihak lain yang menjadi pengikut atau pendamping Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, pejabat eselon II, atau pejabat eselon III, dapat menempati tempat penginapan yang sama dengan pejabat yang diikutinya dan mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelaksana SPD menyerahkan dokumen pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi perintah dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Surat Perintah yang sah kepada Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA atau KPA atau Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan kewenangannya dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. bukti SPD ditandatangani dan cap basah oleh pejabat/instansi/lembaga/badan usaha yang dikunjungi dan dilampirkan foto dan *tag location*;
 - d. bukti pembayaran transportasi, transport lokal, tiket transportasi, *boarding pass*, retribusi, dan/atau bukti pembayaran lainnya;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti kompensasi atas kendaraan ASN yang dipakai untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas berupa fotokopi surat tanda nomor kendaraan yang digunakan;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan/atau
 - h. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(3) Bukti ...

- (3) Bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa pernyataan yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD dan penyedia jasa yang isinya meliputi:
 - a. nama dan alamat penyedia jasa;
 - b. nomor telepon atau kontak personal yang dapat dihubungi;
 - c. jenis sarana yang disediakan/digunakan misalnya bus, minibus, *pick up*, sedan, sepeda motor;
 - d. identitas sarana yang digunakan misalnya nomor polisi kendaraan;
 - e. lama waktu penggunaan sarana;
 - f. lokasi atau tempat pelayanan; dan
 - g. harga.
- (4) Dalam penyelenggaraan kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dengan menggunakan paket *fullboard*, *fullday*, *halfday* dan *residence*, pertanggung jawabannya meliputi:
 - a. izin Bupati;
 - b. undangan kepada peserta;
 - c. susunan acara;
 - d. daftar hadir;
 - e. notulen hasil kegiatan;
 - f. foto kegiatan;
 - g. penawaran dari tempat penyelenggaraan kegiatan;
 - h. surat pesanan; dan
 - i. rincian biaya paket dari tempat penyelenggaraan kegiatan.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas yang dituangkan dalam tanda bukti pengeluaran.
 - (2) Tanda bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diajukan kepada PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) PA atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajiban atas biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
6. Ketentuan mengenai biaya penginapan dan penggantian biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf E dan mengenai uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV huruf F Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025 NOMOR
31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP 19740115 200604 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
KABUPATEN BOYOLALI

A. UANG HARIAN

A.1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN UANG HARIAN DIKLAT

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	Tingkat A, B, C, D, E, DAN F	Tingkat G	Tingkat H	Tingkat I	Tingkat J	Tingkat K	Uang Harian Diklat
1	Aceh	Org/hr	360,000	315,000	275,000	220,000	210,000	210,000	110,000
2	Sumatera Utara	Org/hr	370,000	350,000	325,000	300,000	290,000	260,000	110,000
3	Riau	Org/hr	370,000	350,000	325,000	300,000	290,000	260,000	110,000
4	Kepulauan Riau	Org/hr	370,000	350,000	325,000	300,000	290,000	260,000	110,000
5	Jambi	Org/hr	370,000	350,000	325,000	300,000	290,000	260,000	110,000
6	Sumatera Barat	Org/hr	380,000	330,000	290,000	260,000	250,000	220,000	110,000
7	Sumatera Selatan	Org/hr	380,000	330,000	290,000	260,000	250,000	220,000	110,000
8	Lampung	Org/hr	380,000	330,000	290,000	260,000	250,000	220,000	110,000
9	Bengkulu	Org/hr	380,000	330,000	290,000	260,000	250,000	220,000	110,000
10	Bangka Belitung	Org/hr	410,000	360,000	310,000	280,000	270,000	235,000	120,000
11	Banten	Org/hr	370,000	325,000	280,000	255,000	245,000	215,000	110,000
12	Jawa Barat	Org/hr	430,000	375,000	325,000	295,000	285,000	250,000	130,000

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	Tingkat A, B, C, D, E, DAN F	Tingkat G	Tingkat H	Tingkat I	Tingkat J	Tingkat K	Uang Harian Diklat
13	D.K.I. Jakarta	Org/hr	530,000	460,000	400,000	360,000	350,000	305,000	160,000
14	D.I. Yogyakarta	Org/hr	420,000	365,000	320,000	290,000	280,000	240,000	130,000
15	Jawa Timur	Org/hr	410,000	360,000	310,000	280,000	270,000	235,000	120,000
16	Bali	Org/hr	480,000	420,000	365,000	330,000	320,000	275,000	140,000
17	Nusa Tenggara Barat	Org/hr	440,000	385,000	335,000	300,000	290,000	255,000	130,000
18	Nusa Tenggara Timur	Org/hr	430,000	375,000	325,000	295,000	285,000	250,000	130,000
19	Kalimantan Barat	Org/hr	380,000	330,000	290,000	260,000	250,000	220,000	110,000
20	Kalimantan Tengah	Org/hr	360,000	315,000	275,000	250,000	240,000	210,000	110,000
21	Kalimantan Selatan	Org/hr	380,000	330,000	290,000	260,000	250,000	220,000	110,000
22	Kalimantan Timur	Org/hr	430,000	375,000	325,000	295,000	285,000	250,000	130,000
23	Kalimantan Utara	Org/hr	430,000	375,000	325,000	295,000	285,000	250,000	130,000
24	Sulawesi Utara Utara	Org/hr	370,000	350,000	325,000	300,000	290,000	260,000	110,000
25	Gorontalo	Org/hr	370,000	350,000	325,000	300,000	290,000	260,000	110,000
26	Sulawesi Barat	Org/hr	410,000	360,000	310,000	280,000	270,000	235,000	120,000
27	Sulawesi Selatan	Org/hr	430,000	375,000	325,000	295,000	285,000	250,000	130,000
28	Sulawesi Tengah	Org/hr	370,000	325,000	280,000	255,000	245,000	215,000	110,000
29	Sulawesi Tenggara	Org/hr	380,000	330,000	290,000	260,000	250,000	220,000	110,000
30	Maluku	Org/hr	380,000	330,000	290,000	260,000	250,000	220,000	110,000
31	Maluku Utara	Org/hr	430,000	375,000	325,000	295,000	285,000	250,000	130,000
32	Papua	Org/hr	580,000	505,000	440,000	395,000	385,000	275,000	170,000
33	Papua Barat	Org/hr	480,000	420,000	365,000	330,000	320,000	275,000	140,000
34	Papua Barat Daya	Org/hr	480,000	420,000	365,000	330,000	320,000	275,000	140,000
35	Papua Tengah	Org/hr	580,000	505,000	440,000	395,000	385,000	350,000	170,000
36	Papua Selatan	Org/hr	580,000	505,000	440,000	395,000	385,000	350,000	170,000
37	Papua Barat Pegunungan	Org/hr	580,000	505,000	440,000	395,000	385,000	350,000	170,000

A.2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM LINGKUP PROVINSI JAWA TENGAH DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG HARIAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (Minimal 8 Jam)		UANG HARIAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (kurang dari 8 Jam)	UANG HARIAN DALAM KOTA		
			Selain Kab/Kota Se Solo Raya, Salatiga dan Kab Semarang	Kab/Kota Se Solo Raya, Salatiga dan Kab Semarang		Minimal 8 Jam dan Lebih dari 5 Km	Kurang 8 Jam dan Lebih dari 5 Km	Kurang 8 Jam dan Kurang dari 5 Km
1	Tingkat A	Org/hr	370,000	350,000	100,000	150,000	-	-
2	Tingkat B	Org/hr	370,000	350,000	100,000	150,000	-	-
3	Tingkat C	Org/hr	370,000	350,000	100,000	150,000	-	-
4	Tingkat D	Org/hr	370,000	350,000	100,000	150,000	-	-
5	Tingkat E	Org/hr	370,000	350,000	100,000	150,000	-	-
6	Tingkat F	Org/hr	370,000	350,000	100,000	150,000	-	-
7	Tingkat G	Org/hr	325,000	300,000	100,000	125,000	-	-
8	Tingkat H	Org/hr	280,000	250,000	100,000	90,000	-	-
9	Tingkat I	Org/hr	245,000	220,000	100,000	85,000	-	-
10	Tingkat J	Org/hr	245,000	210,000	100,000	80,000	-	-
11	Tingkat K	Org/hr	215,000	185,000	75,000	50,000		
12	Tim Cek Lokasi Perizinan	Org/hr	-	-	-	-	100,000	-
13	Tim Penegakan Perda	Org/hr	-	-	-	-	100,000	-
14	Tim Unit Reaksi Cepat	Org/hr	-	-	-	-	100,000	75,000
15	Tim penanganan ODGJ/Psikotik	Org/hr	-	-	-	-	100,000	100,000
16	Kunjungan keluarga dan intervensi lanjut kegiatan akselerasi program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) Puskesmas	Org/hr	-	-	-	-	100,000	100,000
17	Perjalanan Dinas dalam wilayah Puskesmas (yang bersumber dari dana Belanja Operasional	Org/hr	-	-	-	-	100,000	50,000

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG HARIAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (Minimal 8 Jam)		UANG HARIAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (kurang dari 8 Jam)	UANG HARIAN DALAM KOTA		
			Selain Kab/Kota Se Solo Raya, Salatiga dan Kab Semarang	Kab/Kota Se Solo Raya, Salatiga dan Kab Semarang		Minimal 8 Jam dan Lebih dari 5 Km	Kurang 8 Jam dan Lebih dari 5 Km	Kurang 8 Jam dan Kurang dari 5 Km
18	Tim Fasilitasi kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Org/hr	-	-	-	-	100,000	75,000
19	Pemberian Uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya						100,000	100,000
20	Pemberian uang transportasi pada masyarakat, kader, peserta KB dan/atau petugas pendukung kegiatan operasional pelayanan KB (yang bersumber dari BOK)	Org/hr					100,000	100,000
21	Petugas pelayanan kesehatan hewan yang dibiayai dari DAK						100,000	75,000

IV.A.3. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	Aceh	OP	120,000	85,000	120,000
2	Sumatra Utara	OP	130,000	95,000	130,000
3	Riau	OP	130,000	85,000	130,000
4	Kepulauan Riau	OP	130.000	95.000	130.000
5	Jambi	OP	130.000	95.000	130.000
6	Sumatra Barat	OP	120.000	85.000	120.000
7	Sumatra Selatan	OP	120.000	85.000	120.000
8	Lampung	OP	130.000	95.000	130.000
9	Bengkulu	OP	130.000	95.000	130.000
10	Bangka Belitung	OP	130.000	95.000	130.000
11	Banten	OP	120.000	85.000	120.000
12	Jawa Barat	OP	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	180.000	130.000	180.000
14	Jawa Tengah	OP	130.000	95.000	130.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	140.000	100.000	140.000
16	Jawa Timur	OP	140.000	100.000	140.000
17	Bali	OP	160.000	115.000	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	150.000	105.000	150.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	140.000	100.000	140.000
20	Kalimantan Barat	OP	130.000	95.000	130.000
21	Kalimantan Tengah	OP	120.000	85.000	120.000
22	Kalimantan Selatan	OP	130.000	95.000	130.000
23	Kalimantan Timur	OP	150.000	105.000	150.000
24	Kalimantan Utara	OP	150.000	105.000	150.000
25	Sulawesi Utara Utara	OP	130.000	95.000	130.000
26	Gorontalo	OP	130.000	95.000	130.000
27	Sulawesi Barat	OP	120.000	85.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OP	150.000	105.000	150.000
29	Sulawesi Tengah	OP	130.000	95.000	130.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	130.000	95.000	130.000
31	Maluku	OP	120.000	85.000	120.000
32	Maluku Utara	OP	130.000	95.000	130.000
33	Papua	OP	200.000	140.000	200.000
34	Papua Barat	OP	160.000	115,000	160.000
35	Papua Barat Daya	OP	160,000	115,000	160.000
36	Papua Tengah	OP	200,000	140,000	200.000
37	Papua Selatan	OP	200,000	140,000	200.000
38	Papua Barat Pegunungan	OP	200,000	140,000	200.000

B. BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (P P)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	Jakarta	Ambon	13,285,000	7,081,000
2	Jakarta	Balikpapan	7,412,000	3,797,000
3	Jakarta	Banda Aceh	7,519,000	4,492,000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2,407,000	1,583,000
5	Jakarta	Banjarmasin	5,252,000	2,995,000
6	Jakarta	Batam	4,867,000	2,888,000
7	Jakarta	Bengkulu	4,364,000	2,621,000
8	Jakarta	Biak	14,065,000	7,519,000
9	Jakarta	Denpasar	5,305,000	3,262,000
10	Jakarta	Gorontalo	7,231,000	4,824,000
11	Jakarta	Jambi	4,065,000	2,460,000
12	Jakarta	Jayapura	14,568,000	8,193,000
13	Jakarta	Yogyakarta	4,107,000	2,268,000
14	Jakarta	Kendari	7,658,000	4,182,000
15	Jakarta	Kupang	9,413,000	5,081,000
16	Jakarta	Makassar	7,444,000	3,829,000
17	Jakarta	Malang	4,599,000	2,695,000
18	Jakarta	Mamuju	7,295,000	4,867,000
19	Jakarta	Manado	10,824,000	5,102,000
20	Jakarta	Manokwari	16,226,000	10,824,000
21	Jakarta	Mataram	5,316,000	3,230,000
22	Jakarta	Medan	7,252,000	3,808,000
23	Jakarta	Padang	5,530,000	2,952,000
24	Jakarta	Palangkaraya	4,984,000	2,984,000
25	Jakarta	Palembang	3,861,000	2,268,000
26	Jakarta	Palu	9,348,000	5,113,000
27	Jakarta	Pangkalpinang	3,412,000	2,139,000
28	Jakarta	Pekanbaru	5,583,000	3,016,000
29	Jakarta	Pontianak	4,353,000	2,781,000
30	Jakarta	Semarang	3,861,000	2,182,000
31	Jakarta	Solo	3,861,000	2,342,000
32	Jakarta	Surabaya	5,466,000	2,674,000
33	Jakarta	Ternate	10,001,000	6,664,000
34	Jakarta	Timika	13,830,000	7,487,000
35	Jakarta	Tanjung Selor	6,057,000	4,057,000
36	Ambon	Denpasar	8,054,000	4,471,000
37	Ambon	Jayapura	7,434,000	4,161,000
38	Ambon	Kendari	4,824,000	2,856,000
39	Ambon	Makassar	6,022,000	3,455,000
40	Ambon	Manokwari	5,177,000	3,027,000
41	Ambon	Palu	6,140,000	3,508,000
42	Ambon	Sorong	3,637,000	2,257,000
43	Ambon	Surabaya	8,803,000	4,845,000
44	Ambon	Ternate	4,022,000	2,449,000
45	Balikpapan	Banda Aceh	12,739,000	6,749,000
46	Balikpapan	Batam	10,354,000	5,305,000
47	Balikpapan	Denpasar	10,739,000	5,648,000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
48	Balikpapan	Jayapura	19,071,000	10,086,000
49	Balikpapan	Yogyakarta	9,669,000	4,749,000
50	Balikpapan	Makassar	12,664,000	6,150,000
51	Balikpapan	Manado	15,702,000	7,295,000
52	Balikpapan	Medan	12,493,000	6,140,000
53	Balikpapan	Padang	10,942,000	5,369,000
54	Balikpapan	Palembang	9,445,000	4,749,000
55	Balikpapan	Pekanbaru	10,996,000	5,423,000
56	Balikpapan	Semarang	9,445,000	4,674,000
57	Balikpapan	Solo	9,445,000	4,813,000
58	Balikpapan	Surabaya	10,889,000	5,113,000
59	Balikpapan	Timika	18,408,000	9,445,000
60	Banda Aceh	Denpasar	10,835,000	6,279,000
61	Banda Aceh	Jayapura	19,167,000	10,717,000
62	Banda Aceh	Yogyakarta	9,765,000	5,380,000
63	Banda Aceh	Makassar	12,760,000	6,781,000
64	Banda Aceh	Manado	15,798,000	7,926,000
65	Banda Aceh	Pontianak	9,990,000	5,840,000
66	Banda Aceh	Semarang	9,530,000	5,305,000
67	Banda Aceh	Solo	9,530,000	5,444,000
68	Banda Aceh	Surabaya	10,985,000	5,744,000
69	Banda Aceh	Timika	18,504,000	10,076,000
70	Bandar Lampung	Balikpapan	8,129,000	4,129,000
71	Bandar Lampung	Banda Aceh	8,225,000	4,760,000
72	Bandar Lampung	Banjarmasin	6,193,000	3,412,000
73	Bandar Lampung	Batam	5,840,000	3,316,000
74	Bandar Lampung	Biak	14,119,000	7,487,000
75	Bandar Lampung	Denpasar	6,236,000	3,647,000
76	Bandar Lampung	Jayapura	14,568,000	8,097,000
77	Bandar Lampung	Yogyakarta	5,155,000	2,760,000
78	Bandar Lampung	Kendari	8,354,000	4,482,000
79	Bandar Lampung	Makassar	8,161,000	4,161,000
80	Bandar Lampung	Malang	5,594,000	3,134,000
81	Bandar Lampung	Manado	11,199,000	5,305,000
82	Bandar Lampung	Mataram	6,246,000	3,626,000
83	Bandar Lampung	Medan	7,979,000	4,150,000
84	Bandar Lampung	Padang	6,439,000	3,380,000
85	Bandar Lampung	Palangkaraya	5,947,000	3,401,000
86	Bandar Lampung	Palembang	4,931,000	2,760,000
87	Bandar Lampung	Pekanbaru	6,482,000	3,433,000
88	Bandar Lampung	Pontianak	5,380,000	3,220,000
89	Bandar Lampung	Semarang	4,931,000	2,685,000
90	Bandar Lampung	Solo	4,931,000	2,824,000
91	Bandar Lampung	Surabaya	6,386,000	3,123,000
92	Bandar Lampung	Timika	13,905,000	7,455,000
93	Bandung	Batam	6,289,000	3,583,000
94	Bandung	Denpasar	5,626,000	3,252,000
95	Bandung	Jakarta	2,064,000	1,476,000
96	Bandung	Jambi	5,006,000	2,941,000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
97	Bandung	Yogyakarta	3,369,000	2,129,000
98	Bandung	Padang	6,129,000	3,508,000
99	Bandung	Palembang	4,385,000	2,631,000
100	Bandung	Pangkalpinang	4,599,000	2,738,000
101	Bandung	Pekanbaru	6,525,000	3,701,000
102	Bandung	Semarang	3,027,000	1,957,000
103	Bandung	Solo	3,647,000	2,268,000
104	Bandung	Surabaya	4,824,000	2,856,000
105	Bandung	Tanjung Pandan	4,439,000	2,663,000
106	Banjarmasin	Banda Aceh	10,792,000	6,022,000
107	Banjarmasin	Batam	8,407,000	4,578,000
108	Banjarmasin	Biak	16,686,000	8,749,000
109	Banjarmasin	Denpasar	8,792,000	4,920,000
110	Banjarmasin	Jayapura	17,135,000	9,359,000
111	Banjarmasin	Yogyakarta	7,723,000	4,022,000
112	Banjarmasin	Medan	10,546,000	5,412,000
113	Banjarmasin	Padang	9,006,000	4,642,000
114	Banjarmasin	Palembang	7,498,000	4,022,000
115	Banjarmasin	Pekanbaru	9,049,000	4,696,000
116	Banjarmasin	Semarang	7,498,000	3,958,000
117	Banjarmasin	Solo	7,498,000	4,097,000
118	Banjarmasin	Surabaya	8,942,000	4,385,000
119	Banjarmasin	Timika	16,472,000	8,717,000
120	Batam	Banda Aceh	10,439,000	5,936,000
121	Batam	Denpasar	8,450,000	4,824,000
122	Batam	Jayapura	16,782,000	9,263,000
123	Batam	Yogyakarta	7,370,000	3,936,000
124	Batam	Makassar	10,375,000	5,337,000
125	Batam	Manado	13,413,000	6,482,000
126	Batam	Medan	10,193,000	5,316,000
127	Batam	Padang	8,653,000	4,546,000
128	Batam	Palembang	7,145,000	3,936,000
129	Batam	Pekanbaru	8,707,000	4,599,000
130	Batam	Pontianak	7,594,000	4,396,000
131	Batam	Semarang	7,145,000	3,861,000
132	Batam	Solo	7,145,000	4,000,000
133	Batam	Surabaya	8,600,000	4,300,000
134	Batam	Timika	16,119,000	8,621,000
135	Bengkulu	Palembang	2,899,000	1,893,000
136	Biak	Balikpapan	18,622,000	9,477,000
137	Biak	Banda Aceh	18,718,000	10,108,000
138	Biak	Batam	16,333,000	8,664,000
139	Biak	Denpasar	16,729,000	8,995,000
140	Biak	Jayapura	3,615,000	2,321,000
141	Biak	Yogyakarta	15,648,000	8,108,000
142	Biak	Manado	11,734,000	6,353,000
143	Biak	Medan	18,472,000	9,498,000
144	Biak	Padang	16,932,000	8,728,000
145	Biak	Palembang	15,424,000	8,108,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
146	Biak	Pekanbaru	16,985,000	8,781,000
147	Biak	Pontianak	15,873,000	8,568,000
148	Biak	Surabaya	12,782,000	7,081,000
149	Biak	Timika	5,808,000	3,444,000
150	Denpasar	Jayapura	11,680,000	6,845,000
151	Denpasar	Kupang	5,091,000	2,952,000
152	Denpasar	Makassar	4,182,000	2,631,000
153	Denpasar	Manado	7,851,000	4,278,000
154	Denpasar	Mataram	1,840,000	1,390,000
155	Denpasar	Medan	10,589,000	5,658,000
156	Denpasar	Padang	9,049,000	4,888,000
157	Denpasar	Palangkaraya	8,557,000	4,909,000
158	Denpasar	Palembang	7,541,000	4,278,000
159	Denpasar	Pekanbaru	9,092,000	4,942,000
160	Denpasar	Pontianak	7,990,000	4,738,000
161	Denpasar	Timika	10,140,000	6,129,000
162	Jambi	Balikpapan	7,733,000	4,407,000
163	Jambi	Banjarmasin	7,690,000	4,193,000
164	Jambi	Denpasar	7,733,000	4,439,000
165	Jambi	Yogyakarta	6,653,000	3,551,000
166	Jambi	Kupang	11,434,000	6,075,000
167	Jambi	Makassar	9,659,000	4,952,000
168	Jambi	Malang	7,091,000	3,925,000
169	Jambi	Manado	12,707,000	6,097,000
170	Jambi	Palangkaraya	7,444,000	4,193,000
171	Jambi	Pontianak	6,878,000	4,011,000
172	Jambi	Semarang	6,428,000	3,476,000
173	Jambi	Solo	6,428,000	3,615,000
174	Jambi	Surabaya	7,883,000	3,915,000
175	Jayapura	Yogyakarta	13,274,000	7,690,000
176	Jayapura	Manado	22,109,000	11,263,000
177	Jayapura	Medan	18,932,000	10,097,000
178	Jayapura	Padang	17,381,000	9,327,000
179	Jayapura	Palembang	15,873,000	8,717,000
180	Jayapura	Pekanbaru	17,435,000	9,380,000
181	Jayapura	Pontianak	16,322,000	9,177,000
182	Jayapura	Timika	3,615,000	2,289,000
183	Yogyakarta	Denpasar	3,861,000	2,481,000
184	Yogyakarta	Makassar	6,525,000	3,893,000
185	Yogyakarta	Manado	10,536,000	5,722,000
186	Yogyakarta	Medan	9,519,000	4,770,000
187	Yogyakarta	Padang	7,969,000	4,000,000
188	Yogyakarta	Palembang	6,460,000	3,380,000
189	Yogyakarta	Pekanbaru	8,022,000	4,054,000
190	Yogyakarta	Pontianak	6,910,000	3,840,000
191	Yogyakarta	Timika	11,894,000	7,038,000
192	Kendari	Banda Aceh	12,953,000	7,102,000
193	Kendari	Batam	10,568,000	5,658,000
194	Kendari	Denpasar	5,455,000	3,273,000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
195	Kendari	Yogyakarta	8,129,000	4,706,000
196	Kendari	Padang	11,167,000	5,722,000
197	Kendari	Palembang	9,659,000	5,102,000
198	Kendari	Pekanbaru	11,220,000	5,776,000
199	Kendari	Semarang	9,659,000	5,027,000
200	Kendari	Solo	9,659,000	5,166,000
201	Kendari	Surabaya	11,103,000	5,466,000
202	Kendari	Timika	18,633,000	9,798,000
203	Kupang	Jayapura	14,386,000	8,108,000
204	Kupang	Yogyakarta	7,348,000	4,182,000
205	Kupang	Makassar	7,637,000	4,311,000
206	Kupang	Manado	11,648,000	6,140,000
207	Kupang	Surabaya	6,749,000	3,722,000
208	Makassar	Biak	8,493,000	4,931,000
209	Makassar	Jayapura	10,193,000	5,787,000
210	Makassar	Kendari	2,663,000	1,786,000
211	Makassar	Manado	5,327,000	2,909,000
212	Makassar	Timika	11,723,000	6,567,000
213	Malang	Balikpapan	10,108,000	5,134,000
214	Malang	Banda Aceh	10,204,000	5,765,000
215	Malang	Banjarmasin	8,161,000	4,407,000
216	Malang	Batam	7,819,000	4,311,000
217	Malang	Biak	16,087,000	8,482,000
218	Malang	Jayapura	16,536,000	9,092,000
219	Malang	Kendari	10,322,000	5,487,000
220	Malang	Makassar	10,129,000	5,166,000
221	Malang	Manado	13,167,000	6,311,000
222	Malang	Medan	9,958,000	5,145,000
223	Malang	Padang	8,418,000	4,385,000
224	Malang	Palangkaraya	7,915,000	4,407,000
225	Malang	Palembang	6,899,000	3,765,000
226	Malang	Pekanbaru	8,461,000	4,439,000
227	Malang	Timika	15,873,000	8,461,000
228	Manado	Medan	15,552,000	7,316,000
229	Manado	Padang	14,012,000	6,546,000
230	Manado	Palembang	12,504,000	5,926,000
231	Manado	Pekanbaru	14,055,000	6,599,000
232	Manado	Pontianak	12,953,000	6,396,000
233	Manado	Semarang	12,504,000	5,851,000
234	Manado	Solo	12,504,000	5,990,000
235	Manado	Surabaya	9,937,000	5,262,000
236	Manado	Timika	16,183,000	8,995,000
237	Mataram	Balikpapan	10,750,000	5,615,000
238	Mataram	Banda Aceh	10,846,000	6,246,000
239	Mataram	Banjarmasin	8,803,000	4,888,000
240	Mataram	Batam	8,461,000	4,803,000
241	Mataram	Biak	11,552,000	6,546,000
242	Mataram	Jayapura	13,092,000	7,327,000
243	Mataram	Yogyakarta	4,417,000	2,781,000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
244	Mataram	Makassar	4,717,000	2,909,000
245	Mataram	Manado	8,717,000	4,738,000
246	Mataram	Medan	10,600,000	5,637,000
247	Mataram	Padang	9,060,000	4,867,000
248	Mataram	Palembang	7,551,000	4,246,000
249	Mataram	Pekanbaru	9,102,000	4,909,000
250	Mataram	Pontianak	8,001,000	4,706,000
251	Mataram	Surabaya	3,829,000	2,321,000
252	Medan	Banda Aceh	3,466,000	2,193,000
253	Medan	Makassar	12,514,000	6,172,000
254	Medan	Pontianak	9,733,000	5,230,000
255	Medan	Semarang	9,284,000	4,696,000
256	Medan	Solo	9,284,000	4,835,000
257	Medan	Surabaya	10,739,000	5,134,000
258	Medan	Timika	18,258,000	9,455,000
259	Padang	Makassar	10,974,000	5,402,000
260	Padang	Pontianak	8,193,000	4,460,000
261	Padang	Semarang	7,744,000	3,925,000
262	Padang	Solo	7,744,000	4,065,000
263	Padang	Surabaya	9,199,000	4,364,000
264	Padang	Timika	16,718,000	8,685,000
265	Palangkaraya	Banda Aceh	10,546,000	6,022,000
266	Palangkaraya	Batam	8,161,000	4,578,000
267	Palangkaraya	Yogyakarta	7,477,000	4,022,000
268	Palangkaraya	Mataram	8,557,000	4,888,000
269	Palangkaraya	Medan	10,300,000	5,412,000
270	Palangkaraya	Padang	8,760,000	4,642,000
271	Palangkaraya	Palembang	7,252,000	4,022,000
272	Palangkaraya	Pekanbaru	8,803,000	4,696,000
273	Palangkaraya	Semarang	7,252,000	3,947,000
274	Palangkaraya	Solo	7,252,000	4,086,000
275	Palangkaraya	Surabaya	8,696,000	4,385,000
276	Palembang	Balikpapan	9,894,000	5,220,000
277	Palembang	Makassar	9,466,000	4,781,000
278	Palembang	Pontianak	6,685,000	3,840,000
279	Palembang	Semarang	6,236,000	3,305,000
280	Palembang	Solo	6,236,000	3,444,000
281	Palembang	Surabaya	7,690,000	3,744,000
282	Palembang	Timika	15,210,000	8,076,000
283	Palu	Makassar	4,268,000	2,578,000
284	Palu	Poso	1,957,000	1,423,000
285	Palu	Sorong	6,878,000	3,883,000
286	Palu	Surabaya	6,878,000	3,883,000
287	Palu	Toll-Toll	2,941,000	1,915,000
288	Pangkalpinang	Balikpapan	9,038,000	4,631,000
289	Pangkalpinang	Banjarmasin	7,091,000	3,915,000
290	Pangkalpinang	Batam	6,739,000	3,818,000
291	Pangkalpinang	Yogyakarta	6,065,000	3,262,000
292	Pangkalpinang	Makassar	9,060,000	4,663,000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
293	Pangkalpinang	Manado	12,097,000	5,808,000
294	Pangkalpinang	Medan	8,888,000	4,653,000
295	Pangkalpinang	Padang	7,337,000	3,883,000
296	Pangkalpinang	Palembang	5,829,000	3,262,000
297	Pangkalpinang	Pekanbaru	7,391,000	3,936,000
298	Pangkalpinang	Pontianak	6,279,000	3,733,000
299	Pangkalpinang	Semarang	5,829,000	3,187,000
300	Pangkalpinang	Solo	5,829,000	3,326,000
301	Pangkalpinang	Surabaya	7,284,000	3,626,000
302	Pekanbaru	Pontianak	8,247,000	4,514,000
303	Pekanbaru	Semarang	7,797,000	3,979,000
304	Pekanbaru	Solo	7,797,000	4,118,000
305	Pekanbaru	Surabaya	9,241,000	4,407,000
306	Pekanbaru	Timika	16,771,000	8,739,000
307	Pontianak	Makassar	9,915,000	5,241,000
308	Pontianak	Semarang	6,685,000	3,765,000
309	Pontianak	Solo	6,685,000	3,904,000
310	Pontianak	Surabaya	8,140,000	4,204,000
311	Pontianak	Timika	15,659,000	8,535,000
312	Semarang	Makassar	9,466,000	4,706,000
313	Solo	Makassar	9,466,000	4,845,000
314	Solo	Denpasar	3,198,000	1,979,000
315	Surabaya	Jayapura	12,675,000	7,231,000
316	Surabaya	Makassar	5,936,000	3,433,000
317	Surabaya	Timika	11,295,000	6,589,000

C. BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Aceh	Org/kali	127,000
2	Sumatra Utara	Org/kali	308,000
3	Riau	Org/kali	101,000
4	Kepulauan Riau	Org/kali	165,000
5	Jambi	Org/kali	147,000
6	Sumatra Barat	Org/kali	190,000
7	Sumatra Selatan	Org/kali	179,000
8	Lampung	Org/kali	168,000
9	Bengkulu	Org/kali	109,000
10	Bangka Belitung	Org/kali	97,000
11	Banten	Org/kali	536,000
12	Jawa Barat	Org/kali	200,000
13	D.K.1.Jakarta	Org/kali	256,000
14	Jawa Tengah	Org/kali	108,000
15	D.1.Yogyakarta	Org/kali	267,000
16	Jawa Timur	Org/kali	233,000
17	Bali	Org/kali	227,000
18	Nusa Tenggara Barat	Org/kali	231,000
19	Nusa Tenggara Timur	Org/kali	116,000
20	Kalimantan Barat	Org/kali	171,000
21	Kalimantan Tengah	Org/kali	134,000
22	Kalimantan Selatan	Org/kali	180,000
23	Kalimantan Timur	Org/kali	533,000
24	Kalimantan Utara	Org/kali	218,000
25	Sulawesi Utara	Org/kali	138,000
26	Gorontalo	Org/kali	265,000
27	Sulawesi Barat	Org/kali	313,000
28	Sulawesi Selatan	Org/kali	187,000
29	Sulawesi Tengah	Org/kali	165,000
30	Sulawesi Tenggara	Org/kali	171,000
31	Maluku	Org/kali	288,000
32	Maluku Utara	Org/kali	215,000
33	Papua	Org/kali	513,000
34	Papua Barat	Org/kali	236,000
35	Papuabarat Daya	Org/kali	236,000
36	Papua Tengah	Org/kali	513,000
37	Papua Selatan	Org/kali	513,000
38	Papua Pegunungan	Org/kali	513,000

D. SATUAN BIAYA TRASNPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI
KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Org/Kali	275,000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Org/Kali	298,000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Org/Kali	183,000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Org/Kali	238,000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Org/Kali	325,000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Org/Kali	420,000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Org/Kali	315,000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Org/Kali	293,000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Org/Kali	460,000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Org/Kali	289,000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Org/Kali	270,000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Org/Kali	278,000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Org/Kali	220,000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Org/Kali	370,000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Org/Kali	275,000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Org/Kali	190,000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Org/Kali	205,000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Org/Kali	301,000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Org/Kali	240,000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Org/Kali	400,000
SUMATRA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Org/Kali	259,000
22	Medan	Kab. Batubara	Org/Kali	225,000
23	Medan	Kab. Dairi	Org/Kali	270,000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Org/Kali	186,000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Org/Kali	300,000
26	Medan	Kab. Karo	Org/Kali	200,000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Org/Kali	287,000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Org/Kali	360,000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Org/Kali	300,000
30	Medan	Kab. Langkat	Org/Kali	186,000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Org/Kali	420,000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Org/Kali	420,000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Org/Kali	420,000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Org/Kali	300,000
35	Medan	Kab. Samosir	Org/Kali	330,000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Org/Kali	200,000
37	Medan	Kab. Simalungun	Org/Kali	264,000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Org/Kali	328,000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Org/Kali	345,000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Org/Kali	330,000
41	Medan	Kab. Kab.Toba	Org/Kali	300,000
42	Medan	Kota Kota Binjai	Org/Kali	180,000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Org/Kali	225,000
44	Medan	Kota Sibolga	Org/Kali	345,000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Org/Kali	285,000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Org/Kali	203,000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Org/Kali	380,000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Org/Kali	315,000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Org/Kali	200,000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Org/Kali	300,000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Org/Kali	225,000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Org/Kali	350,000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Org/Kali	322,000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Org/Kali	350,000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Org/Kali	400,000
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Org/Kali	185,000
57	Jambi	Kab. Batanghari	Org/Kali	175,000
58	Jambi	Kab. Bungo	Org/Kali	270,000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Org/Kali	325,000
60	Jambi	Kab. Merangin	Org/Kali	260,000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Org/Kali	170,000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Org/Kali	241,000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Org/Kali	225,000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Org/Kali	190,000
65	Jambi	Kab. Tebo	Org/Kali	250,000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Org/Kali	308,000
SUMATRA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Org/Kali	225,000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Org/Kali	250,000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Org/Kali	225,000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Org/Kali	205,000
71	Padang	Kab. Pasaman	Org/Kali	250,000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Org/Kali	250,000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Org/Kali	205,000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Org/Kali	225,000
75	Padang	Kab. Solok	Org/Kali	210,000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Org/Kali	250,000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Org/Kali	220,000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Org/Kali	215,000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Org/Kali	210,000
80	Padang	Kota Pariaman	Org/Kali	200,000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Org/Kali	225,000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Org/Kali	215,000
83	Padang	Kota Solok	Org/Kali	210,000
SUMATRA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Org/Kali	203,000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Org/Kali	315,000
86	Palembang	Kab. Lahat	Org/Kali	250,000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Org/Kali	235,000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Org/Kali	235,000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Org/Kali	320,000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Org/Kali	325,000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Org/Kali	205,000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Org/Kali	205,000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Org/Kali	248,000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Org/Kali	250,000
95	Palembang	Kab. Komering Ulu Timur	Org/Kali	245,000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96	Palembang	Kab. Pali	Org/Kali	265,000
97	Palembang	Kab. Lubuk Linggau	Org/Kali	290,000
98	Palembang	Kab. Pagar Alam	Org/Kali	280,000
99	Palembang	Kab. Prabumulih	Org/Kali	205,000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Org/Kali	270,000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Org/Kali	234,000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Org/Kali	246,000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Org/Kali	246,000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Org/Kali	252,000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Org/Kali	276,000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Org/Kali	216,000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Org/Kali	200,000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Org/Kali	222,000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Org/Kali	240,000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Org/Kali	252,000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Org/Kali	267,000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Org/Kali	270,000
113	Bandar Lampung	Kab. Metro	Org/Kali	234,000
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Org/Kali	344,000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Org/Kali	232,000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Org/Kali	313,000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Org/Kali	385,000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Org/Kali	298,000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Org/Kali	375,000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Org/Kali	423,000
121	Bengkulu	Kab. Rajang Lebong	Org/Kali	313,000
122	Bengkulu	Kab. Seloma	Org/Kali	282,000
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkal Pinang	Kab. Bangka	Org/Kali	250,000
124	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Barat	Org/Kali	275,000
125	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	Org/Kali	275,000
126	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Timur	Org/Kali	230,000
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Org/Kali	208,000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Org/Kali	138,000
129	Serang	Kab. Serang	Org/Kali	160,000
130	Serang	Kab. Tangerang	Org/Kali	254,000
131	Serang	Kota Cilegon	Org/Kali	160,000
132	Serang	Kota Tangerang	Org/Kali	313,000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Org/Kali	347,000
JAWA BARAT				
134	Bandung	Kab. Bandung	Org/Kali	183,000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Org/Kali	275,000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Org/Kali	265,000
137	Bandung	Kab. Bogor	Org/Kali	185,000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Org/Kali	245,000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Org/Kali	215,000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Org/Kali	280,000
141	Bandung	Kab. Garut	Org/Kali	243,000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142	Bandung	Kab. Indramayu	Org/Kali	275,000
143	Bandung	Kab. Karawang	Org/Kali	248,000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Org/Kali	275,000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Org/Kali	235,000
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Org/Kali	283,000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Org/Kali	218,000
148	Bandung	Kab. Subang	Org/Kali	208,000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Org/Kali	245,000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Org/Kali	230,000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Org/Kali	245,000
152	Bandung	Kota Banjar	Org/Kali	283,000
153	Bandung	Kota Bekasi	Org/Kali	265,000
154	Bandung	Kota Bogor	Org/Kali	285,000
155	Bandung	Kota Cimahi	Org/Kali	168,000
156	Bandung	Kota Cirebon	Org/Kali	270,000
157	Bandung	Kota Depok	Org/Kali	275,000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Org/Kali	226,000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Org/Kali	245,000
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Org/Kali	260,000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Org/Kali	257,000
162	Semarang	Kab. Batang	Org/Kali	240,000
163	Semarang	Kab. Blora	Org/Kali	270,000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Org/Kali	240,000
165	Semarang	Kab. Brebes	Org/Kali	263,000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Org/Kali	280,000
167	Semarang	Kab. Demak	Org/Kali	230,000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Org/Kali	235,000
169	Semarang	Kab. Jepara	Org/Kali	240,000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Org/Kali	250,000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Org/Kali	260,000
172	Semarang	Kab. Kendal	Org/Kali	230,000
173	Semarang	Kab. Klaten	Org/Kali	250,000
174	Semarang	Kab. Kudus	Org/Kali	235,000
175	Semarang	Kab. Magelang	Org/Kali	240,000
176	Semarang	Kab. Pati	Org/Kali	240,000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Org/Kali	245,000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Org/Kali	250,000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Org/Kali	270,000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Org/Kali	250,000
181	Semarang	Kab. Rembang	Org/Kali	250,000
182	Semarang	Kab. Semarang	Org/Kali	230,000
183	Semarang	Kab. Sragen	Org/Kali	250,000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Org/Kali	250,000
185	Semarang	Kab. Tegal	Org/Kali	260,000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Org/Kali	240,000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Org/Kali	250,000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Org/Kali	250,000
189	Semarang	Kota Magelang	Org/Kali	240,000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Org/Kali	245,000
191	Semarang	Kota Salatiga	Org/Kali	235,000
192	Semarang	Kota Surakarta	Org/Kali	245,000
193	Semarang	Kota Tegal	Org/Kali	260,000
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Org/Kali	250,000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Org/Kali	350,000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Org/Kali	350,000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Org/Kali	200,000
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Org/Kali	225,000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Org/Kali	285,000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Org/Kali	255,000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Org/Kali	225,000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Org/Kali	255,000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Org/Kali	225,000
204	Surabaya	Kab. Jember	Org/Kali	261,000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Org/Kali	235,000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Org/Kali	235,000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Org/Kali	225,000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Org/Kali	261,000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Org/Kali	245,000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Org/Kali	253,000
211	Surabaya	Kab. Malang	Org/Kali	228,000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Org/Kali	225,000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Org/Kali	245,000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Org/Kali	253,000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Org/Kali	285,000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Org/Kali	243,000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Org/Kali	228,000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Org/Kali	255,000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Org/Kali	228,000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Org/Kali	235,000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Org/Kali	240,000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Org/Kali	255,000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Org/Kali	255,000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Org/Kali	245,000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Org/Kali	245,000
226	Surabaya	Kab. Kab. Tulungagung	Org/Kali	245,000
227	Surabaya	Kota Batu	Org/Kali	242,000
228	Surabaya	Kota Blitar	Org/Kali	255,000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Org/Kali	225,000
230	Surabaya	Kota Kediri	Org/Kali	235,000
231	Surabaya	Kota Madiun	Org/Kali	245,000
232	Surabaya	Kota Malang	Org/Kali	228,000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Org/Kali	225,000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Org/Kali	228,000
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Org/Kali	188,000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Org/Kali	225,000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Org/Kali	265,000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Org/Kali	225,000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Org/Kali	270,000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Org/Kali	263,000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Org/Kali	225,000
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Org/Kali	325,000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Org/Kali	450,000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Org/Kali	350,000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Org/Kali	325,000
246	Kupang	Kab. Kupang	Org/Kali	175,000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Org/Kali	218,000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Org/Kali	275,000
KALIMANTANBARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Org/Kali	270,000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Org/Kali	550,000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Org/Kali	550,000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Org/Kali	550,000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Org/Kali	185,000
254	Pontianak	Kab. Landak	Org/Kali	270,000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Org/Kali	430,000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Org/Kali	230,000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Org/Kali	300,000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Org/Kali	303,000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Org/Kali	343,000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Org/Kali	392,000
261	Pontianak	Kab. Singkawang	Org/Kali	257,000
KALIMANTANTENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Org/Kali	290,000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Org/Kali	333,000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Org/Kali	425,000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Org/Kali	300,000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Org/Kali	275,000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Org/Kali	250,000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Org/Kali	425,000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Org/Kali	300,000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Org/Kali	525,000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Org/Kali	448,000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Org/Kali	250,000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Org/Kali	328,000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Org/Kali	525,000
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Org/Kali	230,000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Org/Kali	170,000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Org/Kali	200,000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai	Org/Kali	200,000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai	Org/Kali	212,000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai	Org/Kali	218,000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Org/Kali	290,000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Org/Kali	234,000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Org/Kali	300,000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Org/Kali	200,000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Org/Kali	189,000
286	Banjarmasin	Kab. Banjarbaru	Org/Kali	225,000
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Org/Kali	1,500,000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Org/Kali	500,000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Org/Kali	1,350,000
290	Samarinda	Kab. Paser	Org/Kali	1,650,000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Org/Kali	650,000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Org/Kali	550,000
293	Samarinda	Kota Bontang	Org/Kali	600,000
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Org/Kali	250,000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Org/Kali	275,000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Org/Kali	250,000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Org/Kali	300,000
298	Manado	Kab. Minahasa	Org/Kali	180,000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Org/Kali	180,000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Org/Kali	200,000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Org/Kali	175,000
302	Manado	Kab. Bitung	Org/Kali	175,000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Org/Kali	250,000
304	Manado	Kota Tomohon	Org/Kali	170,000
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Org/Kali	400,000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Org/Kali	300,000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Org/Kali	35,000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Org/Kali	650,000
309	Mamuju	Kab. Majene	Org/Kali	240,000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Org/Kali	359,000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Org/Kali	200,000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Org/Kali	270,000
313	Mamuju	Kab. Pulowali Mandar	Org/Kali	260,000
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Org/Kali	235,000
315	Makassar	Kab. Barru	Org/Kali	210,000
316	Makassar	Kab. Bone	Org/Kali	240,000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Org/Kali	240,000
318	Makassar	Kab. Kab. Enrekang	Org/Kali	250,000
319	Makassar	Kab. Gowa	Org/Kali	175,000
320	Makassar	Kab. Jenepono	Org/Kali	230,000
321	Makassar	Kab. Luwu	Org/Kali	350,000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Org/Kali	375,000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Org/Kali	365,000
324	Makassar	Kab. Maros	Org/Kali	170,000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Org/Kali	230,000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Org/Kali	230,000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Org/Kali	235,000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Org/Kali	235,000
329	Makassar	Kab. Takalar	Org/Kali	190,000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Org/Kali	350,000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Org/Kali	350,000
332	Makassar	Kab. Wajo	Org/Kali	230,000
333	Makassar	Kab. Palo po	Org/Kali	350,000
334	Makassar	Kab. Pare-Pare	Org/Kali	225,000
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Org/Kali	400,000
336	Palu	Kab. Buol	Org/Kali	472,000
337	Palu	Kab. Donggala	Org/Kali	130,000
338	Palu	Kab. Morowali	Org/Kali	400,000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Org/Kali	400,000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Org/Kali	250,000
341	Palu	Kab. Poso	Org/Kali	280,000
342	Palu	Kab. Sigi	Org/Kali	219,000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Org/Kali	350,000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Org/Kali	412,000
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Org/Kali	355,000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Org/Kali	370,000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Org/Kali	300,000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Org/Kali	425,000
349	Kendari	Kab. Konawe	Org/Kali	300,000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Org/Kali	305,000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Org/Kali	300,000
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera	Org/Kali	850,000
353	Sofifi	Kab. Halmahera	Org/Kali	1,000,000
354	Sofifi	Kab. Halmahera	Org/Kali	1,250,000
355	Sofifi	Kab. Halmahera	Org/Kali	900,000
PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Org/Kali	600,000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Org/Kali	900,000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Org/Kali	2,700,000
PAPUA BARAT				
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Org/Kali	900,000
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Org/Kali	750,000
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Org/Kali	2,650,000

E. BIAYA PENGINAPAN DAN PENGGANTI BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN				PENGGANTI BIAYA PENGINAPAN 30%			
			Tingkat A, B dan C	Tingkat D, E	Tingkat F	Tingkat, G, H, I, J dan K	Tingkat A, B, dan C	Tingkat D, E	Tingkat F	Tingkat, G, H, I, J dan K
1	Aceh	Org/hr	4,420,000	3,526,000	1,533,000	770,000	1,326,000	1,058,000	460,000	231,000
2	Sumatra Utara	Org/hr	4,960,000	2,195,000	1,100,000	699,000	1,488,000	659,000	330,000	210,000
3	Riau	Org/hr	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	1,146,000	936,000	495,000	256,000
4	Kepulauan Riau	Org/hr	5,344,000	2,318,000	1,297,000	792,000	1,604,000	696,000	390,000	238,000
5	Jambi	Org/hr	5,000,000	4,102,000	1,225,000	580,000	1,500,000	1,231,000	368,000	174,000
6	Sumatra Barat	Org/hr	5,236,000	3,332,000	1,353,000	701,000	1,571,000	1,000,000	406,000	211,000
7	Sumatra Selatan	Org/hr	5,850,000	3,083,000	1,955,000	861,000	1,755,000	925,000	587,000	259,000
8	Lampung	Org/hr	4,491,000	2,488,000	1,425,000	580,000	1,348,000	747,000	428,000	174,000
9	Bengkulu	Org/hr	2,140,000	1,628,000	1,546,000	692,000	642,000	489,000	464,000	208,000
10	Bangka Belitung	Org/hr	3,827,000	2,838,000	1,957,000	649,000	1,149,000	852,000	588,000	195,000
11	Banten	Org/hr	5,725,000	2,373,000	1,204,000	724,000	1,718,000	712,000	362,000	218,000
12	Jawa Barat	Org/hr	5,381,000	2,755,000	1,201,000	686,000	1,615,000	827,000	361,000	206,000
13	D.K.1.Jakarta	Org/hr	8,720,000	2,063,000	992,000	730,000	2,616,000	619,000	298,000	219,000
14	Jawa Tengah	Org/hr	5,303,000	1,850,000	1,201,000	750,000	1,591,000	555,000	361,000	225,000
15	D.1.Yogyakarta	Org/hr	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	1,506,000	809,000	416,000	254,000
16	Jawa Timur	Org/hr	4,449,000	2,007,000	1,153,000	814,000	1,335,000	603,000	346,000	245,000
17	Bali	Org/hr	6,848,000	2,433,000	1,138,000	1,138,000	2,055,000	730,000	342,000	273,000
18	Nusa Tenggara Barat	Org/hr	4,375,000	2,648,000	1,418,000	907,000	1,313,000	795,000	426,000	273,000
19	Nusa Tenggara Timur	Org/hr	3,750,000	2,133,000	1,355,000	688,000	1,125,000	640,000	407,000	207,000
20	Kalimantan Barat	Org/hr	2,654,000	1,923,000	1,125,000	538,000	797,000	577,000	338,000	162,000
21	Kalimantan Tengah	Org/hr	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	1,471,000	1,018,000	348,000	198,000
22	Kalimantan Selatan	Org/hr	4,797,000	3,316,000	1,500,000	697,000	1,440,000	995,000	450,000	210,000
23	Kalimantan Timur	Org/hr	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	1,200,000	657,000	453,000	242,000
24	Kalimantan Utara	Org/hr	4,000,000	2,735,000	1,507,000	904,000	1,200,000	821,000	453,000	272,000

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN				PENGGANTI BIAYA PENGINAPAN 30%			
			Tingkat A, B dan C	Tingkat D, E	Tingkat F	Tingkat, G, H, I, J dan K	Tingkat A, B, dan C	Tingkat D, E	Tingkat F	Tingkat, G, H, I. J dan K
25	Sulawesi Utara	Org/hr	4,919,000	2,290,000	1,207,000	978,000	1,476,000	687,000	363,000	294,000
26	Gorontalo	Org/hr	4,168,000	3,107,000	1,606,000	955,000	1,251,000	933,000	482,000	287,000
27	Sulawesi Barat	Org/hr	4,076,000	3,098,000	1,344,000	704,000	1,223,000	930,000	404,000	212,000
28	Sulawesi Selatan	Org/hr	4,820,000	1,938,000	1,423,000	745,000	1,446,000	582,000	427,000	224,000
29	Sulawesi Tengah	Org/hr	2,309,000	2,027,000	1,679,000	951,000	693,000	609,000	504,000	286,000
30	Sulawesi Tenggara	Org/hr	3,088,800	2,574,000	1,297,000	786,000	927,000	773,000	390,000	236,000
31	Maluku	Org/hr	3,467,000	3,240,000	1,059,000	667,000	1,041,000	972,000	318,000	201,000
32	Maluku Utara	Org/hr	4,611,600	3,843,000	1,160,000	605,000	1,384,000	1,153,000	348,000	182,000
33	Papua	Org/hr	3,859,000	3,318,000	2,521,000	1,038,000	1,158,000	996,000	757,000	312,000
34	Papua Barat	Org/hr	3,872,000	3,341,000	2,056,000	967,000	1,162,000	1,003,000	617,000	291,000
35	Papua Barat Daya	Org/hr	3,872,000	3,341,000	2,056,000	967,000	1,162,000	1,003,000	617,000	291,000
36	Papua Tengah	Org/hr	3,859,000	3,318,000	2,521,000	1,038,000	1,158,000	996,000	757,000	312,000
37	Papua Selatan	Org/hr	5,673,000	4,877,000	3,706,000	1,038,000	1,702,000	1,464,000	1,112,000	312,000
38	Papua Pegunungan	Org/hr	5,711,000	4,911,000	3,731,000	1,536,000	1,714,000	1,474,000	1,120,000	461,000

F. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG REPRESENTASI	
			Luar Kota lebih dari 8 jam	Dalam Kota Minimal 8 Jam dan Lebih dari 5 Km
1	Tingkat A	Org/hr	250,000	125,000
2	Tingkat B	Org/hr	250,000	125,000
3	Tingkat C	Org/hr	250,000	125,000
4	Tingkat D	Org/hr	200,000	100,000
5	Tingkat E	Org/hr	150,000	75,000

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN